

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

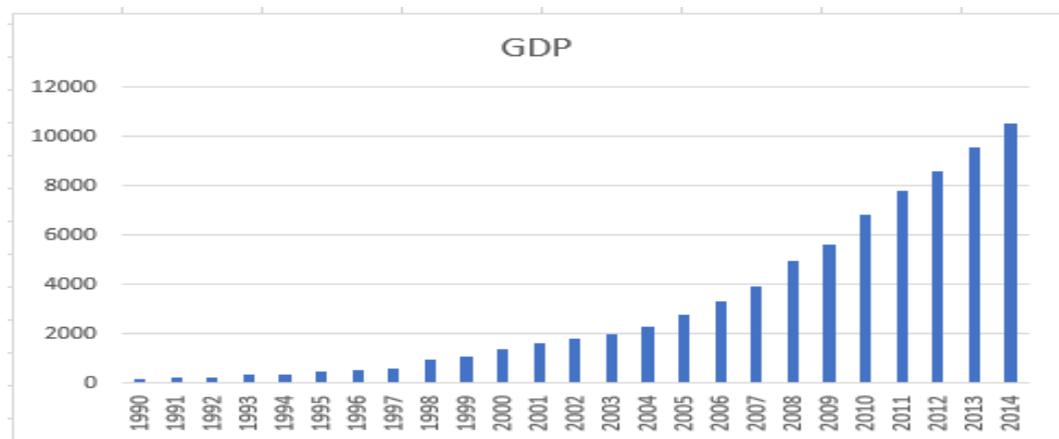
Pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan di mana perekonomian terkendali dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah salah satu tujuan utama mayoritas setiap negara dalam menjalankan perekonomiannya. Menurut Karlina (2017), pertumbuhan ekonomi mencerminkan kualitas kesejahteraan rakyat dan kualitas pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai ketika kondisi variabel ekonomi makro pada kondisi yang stabil. Keynes mengemukakan bahwa untuk mencapai kondisi tersebut, diperlukan campur tangan pemerintah dalam bentuk berbagai kebijakan, salah satu perwujudannya adalah kebijakan fiskal dan moneter (Setiawan, 2018).

Kebijakan moneter merupakan bagian dari kebijakan makroekonomi yang sangat penting perannya dalam mempengaruhi kondisi ekonomi suatu negara. Kebijakan moneter dilakukan oleh otoritas moneter untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar otoritas moneter menggunakan kebijakan suku bunga (*rate*). Berhasil atau tidaknya kebijakan moneter dapat dilihat dari dampak positifnya terhadap variabel ekonomi makro (Dewi, 2020). Kebijakan moneter di Indonesia dikendalikan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen. Bank Indonesia memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan kebijakam moneter, sehingga Bank Indonesia sering disebut pula sebagai otoritas moneter (Rahmawati et al., 2020).

Dalam penelitian ini, variabel kebijakan moneter yang digunakan adalah suku bunga (*rate*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai suku bunga acuan bagi pelaksanaan perbankan di Indonesia. Penurunan suku bunga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, karena jika suku bunga turun akan menaikkan minat masyarakat untuk melakukan kredit baik untuk konsumsi ataupun investasi. Jika suku bunga meningkat, maka investor asing kurang tertarik untuk menanam modal di Indonesia, bisa jadi investor domestik akan berinvestasi ke luar negeri. Sehingga dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Kaveh et al., 2020).

Kebijakan moneter merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah perekonomian, pertumbuhan ekonomi tidak akan bisa dianalisis tanpa melibatkan persoalan moneter. Terdapat beberapa indikator ekonomi dalam negeri yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia antar lain suku bunga, nilai tukar, inflasi, ekspor dan konsumsi masyarakat. Pertumbuhan Ekonomi dalam penelitian ini dilihat dari angka *Gross Domestic Product* (GDP) periode 1990-2014 tertera pada Grafik 1.1.

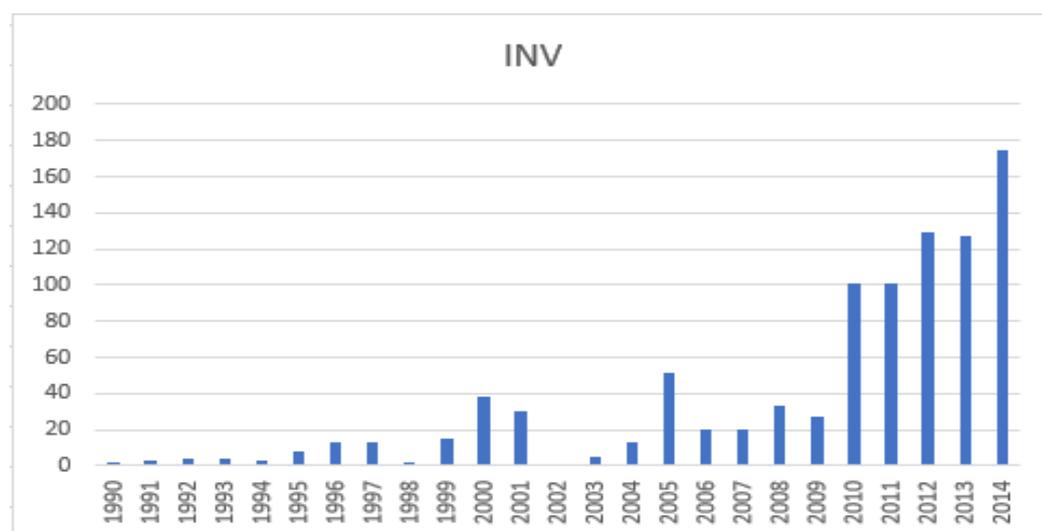
Grafik 1. 1 *Gross Domestic Product* di Indonesia Periode 1990-2014 (Triliun Rupiah)



Sumber: Word Bank

Berdasarkan Grafik 1.1 terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari GDP mengalami keadaan fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan pada tahun 1990-1997. Angka GDP pada tahun 1997 sebesar 95,13 triliun rupiah berada pada posisi minus, dan cenderung mengalami perekonomian yang buruk. Pada tahun 1999-2014 laju pertumbuhan ekonomi mulai mengalami peningkatan dan menuju pada keadaan stabil. Hal tersebut disebabkan karena adanya peningkatan investasi, di mana pemerintah pada awal tahun 1990 melakukan pembentukan kebijakan perbaikan iklim investasi dengan melakukan promosi secara langsung kenegara Timur Tengah pada bulan November 2006 serta menyusun kemitraan antar pemerintah untuk peningkatan investasi. Selain itu juga karena adanya penerbitan peraturan terpadu satu pintu untuk semua perizinan, dan pengadministrasian investasi sehingga pelaksanaan investasi semakin mudah dan semakin banyak (Sudirman & Alhudhori, 2018). Pertumbuhan investasi di Indonesia Tahun 1990-2019 tertera pada Grafik 1.2.

Grafik 1. 2 Investasi di Indonesia Periode 1990-2014



Sumber: Word Bank

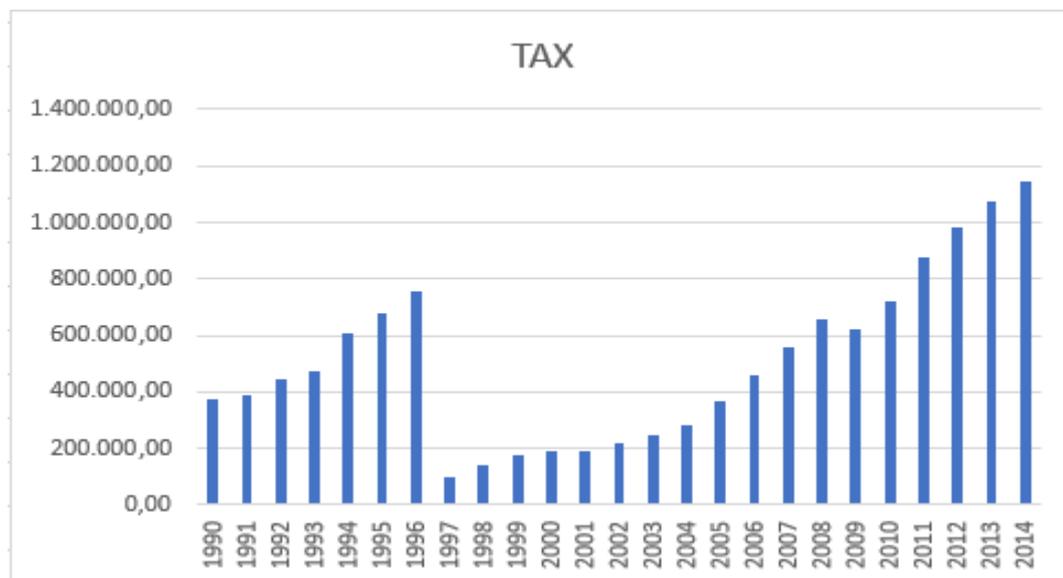
Apabila dilihat total investasi (PMA dan PMDN) pada Grafik 1.2 yang berfluktuasi disebabkan dari dampak kondisi ekonomi dan fenomena yang terjadi saat ini misalnya saja krisis ekonomi, sehingga tingkat kepercayaan investor dan iklim investasi menurun, hal ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menurut Ginting (2015) upaya yang dilakukan negara yang sedang berkembang untuk menarik investor asing salah satunya yakni dengan menyediakan lingkungan yang kondusif.

Khan et al. (2019) menyatakan bahwa proporsi investasi swasta memiliki efek yang lebih kuat terhadap pertumbuhan daripada investasi publik, secara luas bahwa sektor swasta memegang kunci untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan pembangunan ekonomi. Investasi merupakan kebijakan fiskal, kebijakan ini mengatur kegiatan ekonomi secara makro, di samping kebijakan fiskal dalam mengendalikan pertumbuhan ekonomi secara makro, di samping kebijakan fiskal juga terdapat kebijakan moneter yang merupakan partner kebijakan fiskal dalam mengendalikan pertumbuhan ekonomi (Trisnu & Sudiana, 2019).

Dalam kondisi perekonomian yang lesu, Investasi dapat memberikan stimulasi kepada perekonomian untuk tumbuh melalui kebijakan fiskal investasi dan penurunan pajak untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan mengurangi pengangguran, sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat. Sedangkan kebijakan moneter merupakan kebijakan Bank Indonesia selaku pemegang otoritas moneter di Indonesia yang bertujuan dalam mencapai perkembangan kegiatan perekonomian nasional yang maju dan stabil (Nurlina & Zurjani, 2018).

Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mengarahkan kondisi perekonomian ke arah perekonomian yang lebih baik lagi dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Pemerintah dalam menjalankan kebijakan fiskal dengan menggunakan instrumen pengeluaran pemerintah dan pajak. Melalui instrumen pengeluaran pemerintah dan pajak, pemerintah dapat mempengaruhi harga dalam pasar. Pajak di Indonesia Tahun 1990-2014 tertera pada Grafik 1.3.

Grafik 1. 3 Pajak di Indonesia Periode 1990-2014 (Miliar Rupiah)



Sumber: BPS

Berdasarkan Grafik 1.3 terlihat bahwa pajak pada periode tahun 1990 – 1996, penerimaan pajak di Indonesia mengalami peningkatan rata-rata per tahun sebesar 21,43 persen. Meskipun terjadi krisis finansial yang melanda Asia Tenggara dan berdampak buruk bagi perekonomian Indonesia pada akhir 1997 sebesar 13,09 miliar rupiah, ternyata tidak mempengaruhi penerimaan pajak dalam negeri. Hal ini

dapat di lihat dari realisasi penerimaan pajak di Indonesia selama tahun 1997 – 1998 yang meningkat sebesar 36,36 persen.

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, supaya pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan (Fitriani, 2019).

Menurut Undang - Undang No. 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sbesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari berbagai pengertian tentang pajak, baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat di paksakan), dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

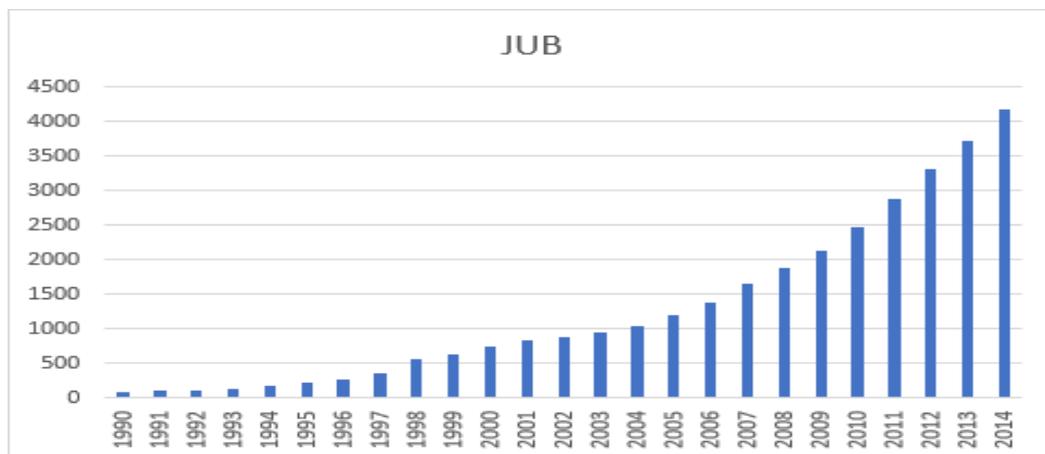
1. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor Negara (pemungut pajak atau administrator pajak).

3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh parawajib pajak.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) berdasarkan Undang-Undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung yang akan digunakan untuk pembiayaan keperluan umum pemerintah.

Jumlah uang beredar (*Monney Supply*) di Indonesia diartikan sebagai tagihan masyarakat terhadap sektor perbankan. Indonesia secara resmi menganut konsep jumlah uang beredar M1 (*Narrow Money*), di mana uang kuasi yang berupa deposito berjangka dan tabungan bukan merupakan komponen jumlah uang beredar, melainkan hanya sebagian dari likuiditas perbankan. Pertumbuhan jumlah uang beredar di Indonesia Tahun 1990-2014 tertera pada Grafik 1.4.

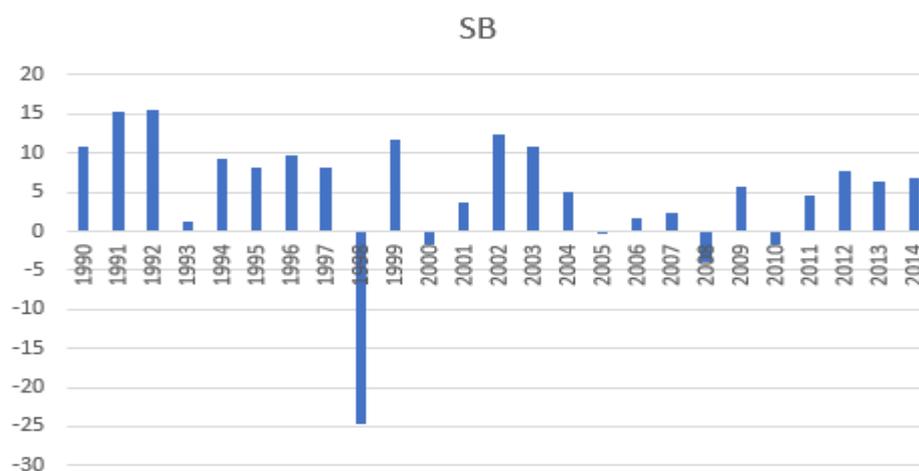
Grafik 1. 4 Jumlah Uang Beredar di Indonesia Periode 1990-2014 (Triliun Rupiah)



Sumber: World Bank

Berdasarkan Grafik 1.4 terlihat bahwa jumlah uang beredar selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena kebutuhan akan uang untuk konsumsi masyarakat selalu bertambah dan menyebabkan inflasi yang selalu tinggi setiap tahunnya dan menyebabkan terjadinya peningkatan permintaan akan barang-barang yang diekspor dan harga barang-barang yang diimpor menjadi lebih murah sehingga tingkat inflasi menurun. Indonesia sebagaimana negara lainnya di berbagai belahan dunia yang juga memiliki mata uang tersendiri, yaitu mata uang rupiah. Mata uang yang dimiliki oleh negara-negara diberbagai belahan dunia semuanya bertujuan untuk memudahkan dalam bertransaksi dalam berbagai macam kebutuhan akan barang dan jasa. Jika terjadi transaksi dalam perdagangan antar dua negara yang tentunya berlainan mata uang, maka dalam hal ini diperlukan adanya suatu angka pembanding nilai mata uang suatu negara dengan negara lain.

Grafik 1. 5 Suku Bunga di Indonesia Periode 1990-2014 (%)



Sumber: Word Bank

Berdasarkan Grafik 1.5 terlihat bahwa pada Tahun 2005 terjadi peristiwa yang menyebabkan suku bunga acuan begitu tinggi ini di sebabkan karena fenomena harga BBM yang merangkak naik. Bank Indonesia selaku pengatur

stabilitas ekonomimakro pada tahun 2006 mengambil kebijakan moneter ketat, seiring masih tingginya angka inflasi. Kebijakan moneter yang ketat masih akan diberlakukan. Kenaikan BI rate hingga 12.25 persen itu untuk menjaga inflasi. Stabilitas moneter di dalam negeri mengalami tekanan eksternal berupa kenaikan suku bunga internasional dan meningkatnya harga minyak dunia. Suku bunga *Fed Funds* meningkat secara bertahap hingga 4.25 persen pada Desember 2005.

Tujuan akhir dari kebijakan moneter adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Untuk mencapai tujuan itu Bank Indonesia menetapkan suku bunga kebijakan BI Rate sebagai instrumen kebijakan utama untuk mempengaruhi aktivitas kegiatan perekonomian dengan tujuan pencapaian inflasi. BI rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap kebijakan moneter yang ditetapkan oleh BI dan di umumkan kepada publik (Luwihadi & Arka, 2017).

Menurut Nurjannah et al. (2017), sikap kebijakan moneter tercermin dari penetapan BI Rate yang di harapkan akan memengaruhi suku bunga pasar uang, suku bunga deposito, dan suku bunga kredit perbankan. Perubahan suku bunga ini akan mempengaruhi defisit transaksi berjalan, nilai rupiah, tingkat inflasi, pasar modal, dan investasi. Namun jalur atau transmisi dari keputusan BI rate sampai dengan pencapaian sasaran inflasi tersebut sangat kompleks dan memerlukan waktu (*time lag*). Jalur atau transmisi dari keputusan ini lah berpengaruh pada aspek makro dan khususnya sektor keuangan dan perbankan. Sektor keuangan dan perbankan memiliki pengaruh apabila melihat risiko perekonomian cukup tinggi, respon perbankan terhadap penurunan suku bunga BI rate biasanya sangat lambat.

Apabila perbankan sedang melakukan konsolidasi untuk memperbaiki permodalan, penurunan suku bunga kredit dan meningkatnya permintaan kredit belum tentu direspon dengan menaikkan penyaluran kredit. Di sisi permintaan, penurunan suku bunga kredit perbankan juga belum tentu direspon oleh meningkatnya permintaan kredit dari masyarakat apabila prospek perekonomian sedang lesu (Jayawarsa; & Purnami, 2019).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa permasalahan yang timbul diantaranya adalah bagaimana besarnya pengaruh investasi, suku bunga, jumlah uang yang beredar dan pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia selama kurun waktu 1990-2019.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah menjelaskan menghitung arah dan besarnya pengaruh investasi, suku bunga, jumlah uang yang beredar dan pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia selama kurun waktu 1990-2019.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diambil dari hasil ini adalah:

1. Dapat menjadikan sumber referensi dan informasi tambahan bagi penelitian yang akan datang, khususnya penelitian yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pertumbuhan.
2. Manfaat lainnya, di mana hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

E. Metode Penelitian

E.1. Alat dan Model Penelitian

Alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linear berganda (*Ordinary Least Square*) yaitu sebagai variabel independen Investasi, Pajak, Jumlah Uang yang Beredar, Suku Bunga dan sebagai variabel dependen Pertumbuhan Ekonomi. Penulis melakukan modifikasi model sebagai berikut:

$$\log(GDP)_t = \beta_0 + \beta_1 SB_t + \beta_2 \log(TAX)_t + \beta_3 \log(INV)_t + \beta_4 \log(JUB)_t + \varepsilon_t$$

di mana:

<i>GDP</i>	= Pertumbuhan Ekonomi
<i>INV</i>	= Investasi
<i>TAX</i>	= Pajak
<i>MS</i>	= Jumlah Uang Yang Beredar
<i>SB</i>	= Suku Bunga
β_0	= Konstanta
$\beta_0 \dots \beta_n$	= Slope atau arah garis regresi yang menyatakan nilai Y
<i>t</i>	= Tahun ke-t
ε_t	= Variabel Pengangguran yang mewakili faktor lain

E.2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang diperoleh melalui instansi terkait yaitu: Badan Pusat Statistik (BPS) dan *Word Bank* serta buku-buku literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini ditulis dengan urutan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan latar belakang dan rumusan masalah terkait Analisis kebijakan moneter dan fiskal pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, tujuan penelitian dan gambaran umum penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan landasan teori tentang kebijakan moneter, kebijakan fiskal dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan definisi operasional variabel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data yaitu regresi linier berganda (*Ordinary Least Squares*).

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan deskripsi variabel penelitian, hasil estimasi regresi linier berganda dengan pendekatan OLS (*Ordinary Least Squares*). Serta uji-uji pelengkap, interpretasi hasil penelitian secara statistik dan inteprestasi hasil penelitian secara ekonomi.

BAB V: PENUTUP

Bab ini akan menyampaikan simpulan dari hasil penelitian, saran atau rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan stakeholder lainnya, serta keterbatasan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN